**PERAN MEDIA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG**

Jericho Chaldea Sihite (2316041090)

Reguler C

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Era reformasi telah menghadirkan tuntutan yang semakin kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Paradigma good governance menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi publik dan mempertanggungjawabkan segala kebijakan serta penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks ini, media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus sebagai alat kontrol sosial yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Pemerintah daerah Lampung, sebagai bagian dari sistem desentralisasi di Indonesia, menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penelitian Sunardi (2020), tingkat transparansi Provinsi Lampung masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dalam implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di pemerintah daerah Lampung.

Media, baik media massa tradisional maupun media digital, memiliki kapasitas untuk menggerakkan agenda transparansi pemerintah. Studi Cuadrado-Ballesteros et al. (2017) menunjukkan bahwa tekanan media berperan fundamental dalam mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan, terutama dalam hal informasi ekonomi, keuangan, dan urusan publik[2]. Media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai watchdog yang mengawasi kinerja pemerintah dan mendorong akuntabilitas publik[21][28].

Fenomena digitalisasi telah mengubah landscape komunikasi politik dan pemerintahan. Media sosial dan platform digital telah menjadi sarana baru bagi pemerintah daerah untuk berinteraksi dengan masyarakat, menyebarkan informasi publik, dan membangun transparansi. Penelitian Umayasari (2025) menunjukkan bahwa partisipasi warga melalui media digital di Lampung telah tumbuh signifikan dan berdampak positif terhadap peningkatan transparansi serta kualitas kebijakan daerah.

Namun demikian, efektivitas peran media dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah belum dipahami secara komprehensif. Masih terdapat gap antara potensi media sebagai alat transparansi dengan realitas implementasinya di lapangan. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara empiris bagaimana media berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Lampung.

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran media massa dalam meningkatkan transparansi pemerintah daerah Lampung?

2. Bagaimana peran media massa dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah Lampung?

3. Seberapa besar pengaruh media massa terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Lampung?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran media massa dalam meningkatkan transparansi pemerintah daerah Lampung

2. Menganalisis peran media massa dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah Lampung

3. Mengukur dan menganalisis pengaruh media massa terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Lampung

**1.4 Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori komunikasi politik dan administrasi publik, khususnya dalam memahami dinamika hubungan antara media, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang agenda setting theory dan good governance theory dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

**1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

1. Pemerintah Daerah Lampung: Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan strategi komunikasi publik serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas

2. Media: Sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas peliputan dan peran sebagai watchdog pemerintahan

3. Masyarakat: Sebagai informasi tentang pentingnya peran media dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah

4. Akademisi: Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang topik serupa

---

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Grand Theory: New Public Management (NPM)**

New Public Management (NPM) merupakan grand theory yang mendasari penelitian ini. NPM adalah paradigma administrasi publik yang menekankan penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam sektor publik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitasl. Teori ini dikembangkan sebagai respons terhadap kritik terhadap model administrasi publik tradisional yang dinilai birokratis, tidak efisien, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Hood (1991), NPM memiliki karakteristik utama yang meliputi: pertama, pergeseran fokus dari input dan proses menuju output dan hasil; kedua, penggunaan indikator kinerja dan standar yang jelas; ketiga, penerapan mekanisme pasar dalam pelayanan publik; keempat, desentralisasi organisasi dan pengambilan keputusan; kelima, orientasi pada pelanggan dan kualitas layanan; dan keenam, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, NPM menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep good governance yang mengharuskan pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Media, dalam kerangka NPM, berperan sebagai mekanisme eksternal yang mendorong pemerintah untuk memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan masyarakat.

**2.1.2 Teori Agenda Setting**

Agenda setting theory menjadi salah satu teori pendukung dalam penelitian ini. Teori yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw ini menjelaskan bagaimana media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi publik tentang isu-isu yang dianggap penting. Media tidak hanya melaporkan realitas, tetapi juga membentuk dan menyaring realitas tersebut.

Teori agenda setting memiliki tiga model utama: awareness model, priorities model, dan salience model. Dalam konteks transparansi pemerintah, media dapat menggunakan ketiga model ini untuk mendorong transparansi. Melalui awareness model, media membuat masyarakat sadar akan pentingnya transparansi pemerintah. Priorities model membantu media menetapkan transparansi sebagai prioritas publik, sedangkan salience model memastikan isu transparansi tetap mendapat perhatian publik.

Penelitian Cuadrado-Ballesteros et al. (2017) membuktikan bahwa agenda setting media berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah, terutama dalam momen-momen politik tertentu seperti menjelang pemilihan. Media memiliki kekuatan untuk menetapkan agenda transparansi yang kemudian mendorong pemerintah untuk merespons dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik.

**2.1.3 Teori Institusional**

Teori institusional memberikan perspektif tentang bagaimana institusi, termasuk media dan pemerintah, berinteraksi dalam menciptakan perubahan organisasional. Menurut North (1990), institusi adalah "aturan permainan" dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia dan menyediakan struktur insentif dalam pertukaran politik, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks penelitian ini, teori institusional menjelaskan bagaimana media sebagai institusi eksternal dapat mendorong perubahan institusional dalam pemerintah daerah menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Tekanan institusional dari media dapat memaksa pemerintah daerah untuk mengadopsi praktik-praktik transparansi dan akuntabilitas sebagai respons terhadap legitimasi dan kepercayaan publik.

**2.1.4 Teori Good Governance**

Good governance merupakan konsep yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Menurut UNDP, good governance memiliki karakteristik utama yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, supremasi hukum, dan konsensus. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar fundamental dalam good governance yang tidak dapat dipisahkan.

Transparansi dalam good governance berarti keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sedangkan akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakannya kepada masyarakat.

Media berperan penting dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance dengan menjadi watchdog yang mengawasi kinerja pemerintah dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Melalui fungsi kontrol sosial, media dapat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel.

**2.2 Konsep Transparansi Pemerintah Daerah**

**2.2.1 Definisi dan Dimensi Transparansi**

Transparansi pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Transparansi meliputi keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik.

Adiputra et al. (2018) mengidentifikasi beberapa dimensi transparansi pemerintah daerah yang meliputi: ketersediaan informasi, aksesibilitas informasi, ketepatan waktu penyampaian informasi, dan kualitas informasi yang disampaikan. Penelitian Huwae (2016) menambahkan dimensi frekuensi pengungkapan sebagai indikator penting dalam mengukur transparansi pemerintah daerah.

**2.2.2 Indikator Transparansi**

Berdasarkan penelitian Sunardi (2020) dan berbagai literatur terkait, indikator transparansi pemerintah daerah dapat diukur melalui:

1. Ketersediaan Informasi: Keberadaan informasi publik yang dapat diakses masyarakat

2. ksesibilitas: Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi publik

3. Ketepatan Waktu: Penyampaian informasi yang tepat waktu dan terkini

4. Frekuensi Pengungkapan: Intensitas pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik

**2.3 Konsep Akuntabilitas Pemerintah Daerah**

**2.3.1 Definisi dan Jenis Akuntabilitas**

Akuntabilitas pemerintah daerah merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada masyarakat. Mardiasmo (2016) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah untuk melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah.

Terdapat beberapa jenis akuntabilitas dalam pemerintahan, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal: Pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi

2. Akuntabilitas Horizontal: Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga setara

3. Akuntabilitas Finansial: Pertanggungjawaban penggunaan keuangan publik

4. Akuntabilitas Kinerja: Pertanggungjawaban pencapaian target dan tujuan

**2.3.2 Indikator Akuntabilitas**

Indikator akuntabilitas pemerintah daerah dapat diukur melalui:

1. Akuntabilitas Kebijakan: Pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil

2. Akuntabilitas Program: Pertanggungjawaban pelaksanaan program pemerintah.

3. Akuntabilitas Keuangan: Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

4. Akuntabilitas Prosedural: Pertanggungjawaban prosedur dan mekanisme kerja

**2.4 Peran Media dalam Transparansi dan Akuntabilitas**

**2.4.1 Fungsi Media sebagai Watchdog**

Media memiliki fungsi watchdog atau pengawas terhadap kinerja pemerintah. Fungsi ini meliputi investigasi, monitoring, dan pelaporan tentang aktivitas pemerintah kepada masyarakat. Melalui fungsi watchdog, media dapat mengungkap praktik-praktik yang tidak transparan dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

**2.4.2 Media Digital dan Transparansi Pemerintah**

Era digital telah mengubah cara media berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat. Media digital, termasuk media sosial, telah menjadi platform baru untuk mendorong transparansi pemerintah. Penelitian Umayasari (2025) menunjukkan bahwa partisipasi digital di Lampung telah meningkat signifikan dan berkontribusi terhadap transparansi pemerintah daerah.

Platform digital memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan transparency dan responsivitas pemerintah. Media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menuntut akuntabilitas.

**2.5 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain:

1. Cuadrado-Ballesteros et al. (2017) meneliti peran tekanan media dalam mendorong transparansi pemerintah daerah di Spanyol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan media berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah, terutama dalam informasi ekonomi dan keuangan.

2. Adiputra et al. (2018) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas laporan keuangan dan lingkungan politik berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah.

3. Sunardi (2020) membandingkan indeks transparansi antara pemerintah daerah di Sumatera Selatan dan Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi Lampung masih lebih rendah dibandingkan Sumatera Selatan[35].

4. Umayasari (2025) meneliti partisipasi warga melalui media digital dan implikasinya terhadap akuntabilitas pemerintah daerah di Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi digital berkontribusi positif terhadap transparansi dan kualitas kebijakan daerah.

**2.6 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teori dan konsep-konsep yang telah dijelaskan, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Media massa, melalui fungsi agenda setting dan watchdog, berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Lampung. Dalam kerangka New Public Management, media berperan sebagai mekanisme eksternal yang mendorong pemerintah untuk memenuhi standar good governance. Transparansi dan akuntabilitas yang meningkat akan berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kepercayaan publik.

**2.7 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Media massa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah Lampung

H2: Media massa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Lampung

H3: Media massa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Lampung secara simultan